GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: Suara Pembaruan**	**Tanggal**	**: 24 Februari 2007**
Subyek	**: Reklamasi pantai**	**Hari**	**: Sabtu**
		Halaman	**: 1**

Singapura Terus Mereklamasi Pantai

Wilayah Perairan RI Berkurang 6 Km

[JAKARTA] Penjualan pasir laut Indonesia ke Singapura sudah sepantasnya dihentikan. Pemerintah juga diminta bersikap tegas terhadap proyek reklamasi pantai Singapura, yang telah membuat daratan mereka bertambah 12 kilometer (km) ke arah perairan Indonesia.

"Singapura berencana terus melakukan reklamasi. Penambahan 12 km daratan mereka tidak akan berhenti, tapi akan bertambah lagi. Pemerintah jangan diam, jangan anggap remeh, karena ini menyangkut kedaulatan, harga diri kita sebagai bangsa," kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) di DPR Zulkifli Hasan, Jumat (23/2), di Jakarta.

Apalagi, seperti dikatakan Inspektur Jenderal TNI Angkatan Laut, Mayjen TNI (Mar) Nono Sampono, penambahan 12 km daratan Singapura itu pada saat bersamaan mengakibatkan wilayah perairan Indonesia berkurang 6 km.

Berdasarkan kajian Departemen Kelautan dan Perikanan, Indonesia telah dirugikan sedikitnya 42,38 miliar dolar Singapura, atau lebih dari Rp 237 triliun, akibat ekspor pasir laut yang rata-rata bernilai 1,76 miliar dolar Singapura per tahun, sejak keran ekspor pasir laut dibuka pada 1976. Itu belum termasuk kerugian akibat pencurian pasir laut sekitar 200 juta meter kubik setiap tahun.

Singapura yang menargetkan penambahan luas wilayahnya hingga 834 kilometer persegi pada 2010, diperkirakan membutuhkan paling sedikit 1,6 miliar meter kubik pasir laut untuk proyek reklamasinya.

Kini luas Singapura diperkirakan telah bertambah sekitar 25 persen dari sekitar 580 kilometer persegi, sejak merdeka dari Inggris pada 1959, dan setelah berpisah dari Persekutuan Malaysia pada 1965.

Proyek-proyek reklamasi Singapura sendiri telah meresahkan Malaysia, yang sudah membawanya ke badan peradilan arbitrase internasional (Permanent Court of Arbitration/PCA) di Belanda.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Larangan ekspor pasir laut ke Singapura sendiri disikapi Menteri Pembangunan Nasional Singapura Mah Bow Tan, yang menyebut Pemerintah Singapura kecewa dengan keputusan Indonesia itu. Tan menilai klaim Indonesia ekspor pasir berpengaruh terhadap garis perbatasan, tidak berdasar.

Pernyataan itu mendapat kritik keras dari anggota Komisi I DPR Deddy Djamaludin Malik (FPAN). Pasalnya, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai batas maritim antara Indonesia dengan Singapura.

Penghentian ekspor pasir laut yang dilakukan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dengan SK Menperindag No.117/ MPP/Kep/2/2003, disebut lantaran berlarutnya pembicaraan masalah perbatasan.

"Pada setiap raker dengan Menhan, selalu ditekankan bahwa potensi sumber daya alam harus dipakai sebagai *bargaining power* dengan Singapura," ucap Wakil Ketua Komisi I DPR Sidharto Danusubroto. [B-14]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup